



Keragaman Respon Umat Islam terhadap Isu Penodaan Agama dalam Media Massa di Jawa 1918-1922

Rina Mutoharoh*

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
 rinamth2001@gmail.com

Martina Safitry

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
 martinasafitry@gmail.com

Abstract

The issue of religious blasphemy becomes a national concern when it is disseminated widely and massively. Once it reaches national prominence, diverse reactive patterns emerge. In January 1918, a newspaper in Solo published an article that angered the Muslim community. The article discussed the God of Islam and Prophet Muhammad (peace be upon him) using inappropriate language. Consequently, the article received various reactions and protests from the Muslim community. This study aims to analyze the responses of Islamic community groups to the issue of religious blasphemy during the Dutch colonial period from 1918 to 1922, using historical research methods. Primary sources include contemporary newspapers, supported by secondary sources such as books relevant to the topic. The findings reveal that the community's responses to the incident can be categorized into three approaches: reactive field actions, reactive legal actions, and peaceful reactions. In a contemporary context, the findings of this study can be applied to understand how society responds to similar cases that frequently arise in mass media.

Keywords: Mass Media, Religious Blasphemy, Muslim Community

Abstrak

Isu penistaan agama akan menjadi isu nasional ketika disebarluaskan secara luas dan masif. Setelah menjadi isu nasional maka muncul pola-pola reaktif yang beraneka ragam. Pada Januari 1918 sebuah surat kabar di Solo menerbitkan tulisan yang membuat marah umat Islam. Artikel itu mengulas mengenai Tuhan umat Islam dan Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan yang tidak pantas. Walhasil artikel tersebut mendapatkan berbagai reaksi dan protes dari umat Islam. Studi ini bertujuan untuk menganalisa sikap kelompok-kelompok masyarakat Islam dalam merepon isu penodaan agama di masa kolonial Belanda 1918-1922, dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Sumber primernya adalah berupa surat kabar sezaman, serta didukung oleh sumber sekunder berupa buku-buku yang relevan dengan topik ini. Hasil penelitian menemukan bahwa tiga pendekatan masyarakat dalam merespon peristiwa isu tersebut yaitu reaktif aksi lapangan, reaktif aksi hukum, dan reaktif damai. Dalam konteks kekinian, temuan kajian ini dapat diaplikasikan untuk melihat bagaimana masyarakat merespon kasus-kasus serupa yang kerap terjadi di media massa.

Kata Kunci: Media Massa, Penodaan Agama, Umat Muslim

المخلص

ستصبح قضية التجديف قضية وطنية عندما تنتشر على نطاق واسع وعلى نطاق واسع. وبعد أن أصبحت قضية وطنية، ظهرت أنماط مختلفة من الاستجابة. ففي يناير 1918، نشرت إحدى الصحف في سولو مقالاً أثار غضب المسلمين. استعرض المقال إله المسلمين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعبارة غير لائقة. ونتيجة لذلك، لقي المقال الاستجابات والاحتجاجات المختلفة من المسلمين. يهدف هذا البحث إلى تحليل موقف جماعة المجتمع الإسلامي في الرد على قضية

*Corresponding author

التجديف خلال الفترة الاستعمارية الهولندية 1918-1922، وذلك باستخدام منهج البحث التاريخي. والمصادر الأولية هي الصحف المعاصرة، مدعومة بالمصادر الثانوية مثل الكتب ذات الصلة بهذا الموضوع. وتوصلت نتائج البحث إلى وجود ثلاثة مناهج مجتمعية في الاستجابة للمشكلة: العمل الميداني التفاعلي، والعمل القانوني التفاعلي، والعمل التفاعلي السلمي. في السياق الحالي، يمكن تطبيق نتائج هذا البحث لمعرفة كيفية استجابة الناس للقضايا المماثلة التي غالبًا ما تحدث في وسائل الإعلام.

الكلمات المفتاحية: وسائل الإعلام، التجديف، المسلمون

Pendahuluan

Isu penodaan agama di media massa akhir-akhir ini sering kita jumpai di Indonesia. Sejak kasus Ahok tahun 2016, peristiwa semacam ini menjadi suatu hal yang kerap terjadi, bahkan hingga masuk ranah penyidikan maupun pengadilan. Pertengahan tahun 2023, dunia maya dibanjiri berita seorang pimpinan pondok pesantren besar yang dilaporkan atas kasus penodaan agama akibat ketidaklumrahan kegiatan-kegiatan di pesantren yang dipimpinnya.¹ Selain itu, ada pula *tiktokers* yang dilaporkan ke polisi karena menodakan agama Kristen dalam *live* tiktok melalui akun pribadinya.² Kendatipun tidak semua tertuduh "penista" masuk jeruji besi, namun peristiwa tersebut menjadi problem bagi bangsa Indonesia yang mempunyai berbagai kepercayaan yang dianut oleh warganya. Masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk tetap menjaga kerukunan dan toleransi antar pemeluk agama.

Pada kenyataannya, kasus-kasus penodaan agama tidak dimulai akhir-akhir ini saja. Dalam catatan sejarah, kasus penodaan agama menjadi isu besar sejak lahirnya media massa sebagai alat komunikasi. Media massa yang berkembang pada awal abad ke-20 masih berbentuk koran atau surat kabar. Saat itu, masyarakat bumiputera mulai aktif dalam penerbitan dan menggunakan media massa untuk menyebarkan ide-ide dan semangat kemerdekaan. Surat kabar berfungsi sebagai tempat melaporkan hasil perkembangan organisasi dan sarana komunikasi antara organisasi pusat dan cabang yang di berbagai daerah.³ Karena kedekatannya dengan suatu organisasi, surat kabar sering disebut corong organisasi yang membawa ideologinya masing-masing.

Surat kabar *Djawi Hiswara* yang terbit di Solo merupakan surat kabar swasta. Namun, secara keorganisasian, redaktornya Matodharsono dekat dengan pengurus Sarekat Surakarta saat dipimpin oleh Samanhoedi. Kehidupan redaktornya yang dikelilingi masyarakat keraton membuatnya menganut paham kejawen. Walhasil *Djawi Hiswara* membawa ide-ide kejawen, seperti dianut oleh Martodharsono.⁴ Pada tanggal 9 dan 11 Januari 1918, surat kabar ini memuat artikel yang mengulas tentang Nabi Muhammad SAW hingga kemudian kontroversi. Sebuah percakapan dua orang antara *Djojo* dan *Marco* membicarakan bahwa junjungan umat Islam tersebut suka minum minuman keras dan menghisap opium.⁵ Sontak artikel tersebut mendapat beragam reaksi dari umat Islam di Hindia-Belanda. Tercatat, berbagai macam reaksi utama dalam merespon artikel penistaan agama tersebut. Diantaranya adalah mereka yang merespon secara reaktif, semi reaktif, hingga upaya damai.

Artikel ini mengkaji berbagai respon kelompok-kelompok Islam dalam menanggapi isu penodaan agama oleh surat kabar *Djawi Hiswara*. Untuk melihat hal tersebut, tentu perlu diperhatikan latar belakang masyarakat Islam di Hindia Belanda sehingga menghasilkan respon yang berbeda terhadap kasus yang sama. Oleh karenanya artikel ini bertujuan menjelaskan beragam pendekatan kelompok-kelompok muslim dalam merespon isu penodaan agama di media massa pada era kolonialisme.

¹ Ahmad Nasrudin, "Panji Gumilang Tersangka Penistaan Agama, Berikut Kasusnya," Kompas.com, 2023.

² Rahmad Utomo dan Gloria, "Tiktoker Morteza Melakukan Penistaan Agama, Mengaku Hanya Becanda," Kompas.com, 2023.

³ Mu'arif, *Covering Muhammadiyah: Gerakan Islam Berkemajuan Dalam Sorotan Media Massa Pada Zaman Kolonial Belanda* (IRCiSoD, 2020), 85.

⁴ Ahmad Fajar, "Menuai Kuasa Atas Isu Agama: Politisasi Hos Cokroaminoto Terhadap Polemik Penistaan Agama Pada Surat Kabar Djawi Hisworo Di Hindia Belanda,(1918)" (Salatiga: IAIN Salatiga, 2021), 72.

⁵ H.M. Dachlan and R.Ng. Kartopringgo, "Soerat Terboeka," *Islam Bergerak*, April 1918.

Sebagai upaya memperkuat tulisan, digunakan beberapa hasil kajian terdahulu, antara lain karya Zaini Muchtarom.⁶ Melalui buku ini dapat dilihat klasifikasi masyarakat Islam di Jawa sehingga mampu memunculkan respon yang berbeda dalam sebuah kasus yang sama. Muchtarom menjelaskan secara rinci kehidupan santri dan abangan dalam masyarakat Jawa seiring berkembangnya waktu. Buku ini juga menjelaskan sebetulnya Islam, Jawa mempunyai pondasi kepercayaan yang kuat. Oleh karenanya, saat Islam datang, agama dari timur tengah ini perlu beradaptasi dengan kepercayaan masyarakat Jawa. Hingga kemudian muncul dua klasifikasi masyarakat Islam Jawa, yakni santri dan abangan. Buku ini membantu penulis untuk melihat latar belakang keislaman masyarakat Jawa. Studi Ahmad Fajar⁷ melukiskan pemanfaatan lembaga-lembaga yang semula didirikan untuk melindungi agama Islam dari penistaan, namun ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi para pemimpinnya. Penelitian ini melengkapi topik tersebut dengan mengeksplorasi keragaman pendekatan masyarakat Muslim terhadap isu tersebut.

Kehadiran media massa membantu masyarakat mengakses berbagai informasi secara cepat. Sayangnya, sering kali tidak dibarengi dengan kemampuan menyeleksi berita sehingga para *netizen* bebas membuat dan berbagi status yang belum pasti kebenarannya. Karena diproduksi dan dibagikan secara masif, ditambah dengan fitur komentar, membuat suatu berita yang belum pasti kebenarannya tersebut semakin luas tersebar. Bahkan, banyak *netizen* yang tidak secara sadar melakukan teknik agitasi dan propaganda dalam berbagai komentar dan tulisannya di media massa. Agitasi adalah suatu upaya menggerakkan masa baik menggunakan lisan maupun tulisan.

Pada kasus Ahok, seperti yang diberitakan dalam berbagai media pada 27 September 2016, Basuki Tjahaja Purnama membahas pencalonannya sebagai calon Gubernur DKI 2017 dengan warga di Kepulauan Seribu. Dalam dialognya, Ahok meminta warga untuk bebas memilih siapapun calon gubernurnya dengan menyinggung surat al-Maidah ayat 51. Sontak hal ini mendapat berbagai macam respon dan reaksi di media massa.⁸ Polemik dan saling hujat antar netizen pun terus terjadi di media massa baik melalui editan foto, *meme* yang sarkastik, maupun ujaran-ujaran kebencian lainnya. Hal serupa nyatanya pernah terjadi di masa masa kolonialisme, seperti kasus *Djawi Hiswara* yang menimbulkan kegaduhan di sebagian besar wilayah Jawa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka artikel bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk respon masyarakat Islam terhadap kasus penodaan agama pada surat kabar *Djawi Hiswara* tahun 1918. Sebelum menjabarkan bentuk-bentuk respon tersebut, perlu diketahui karakteristik masyarakat Islam di Jawa untuk mengetahui sebab perbedaan respon tersebut. Selanjutnya artikel ini membahas akhir konflik *Djawi Hiswara* yang pernah menjadi topik hangat mengenai isu penodaan agama di masa kolonial.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo⁹ ada lima tahapan dalam penelitian sejarah yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Setelah menentukan tema, sumber-sumber pendukung dicari dari surat kabar masa lalu, utamanya yang berhubungan dengan kasus penodaan agama dalam surat kabar *Djawi Hiswara*. Surat kabar yang digunakan adalah *Oetoesan Hindia*, *Islam Bergerak*, *Medan Moeslimin*, dan *Darmo Kondoyang* yang dikelola oleh orang-orang Islam dari berbagai latar belakang di Jawa. Menurut sumber yang didapatkan, perbedaan respon terhadap kasus *Djawi Hiswara* diketahui dari berbagai tulisan di surat kabar tersebut. Selain surat kabar, pencarian sumber juga melalui buku-buku di perpustakaan dan artikel daring. Selanjutnya dilakukan verifikasi atau penyeleksian terhadap sumber-sumber yang terkumpul. Setelah sumber terverifikasi, penulis melakukan interpretasi terhadap sumber-sumber dengan mengaitkan terhadap tema dan fakta-fakta sejarah yang ada. Terakhir, fakta-fakta tersebut disusun dalam bentuk penulisan sejarah, yang disebut historiografi.

⁶ Zaini Muchtarom, *Islam Di Jawa Dalam Perspektif Santri & Abangan* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 7.

⁷ Ahmad Fajar, "Menuai Kuasa Atas Isu Agama: Politisasi HOS Cokroaminoto Terhadap Polemik Penistaan Agama Pada Surat Kabar Djawi Hisworo Di Hindia Belanda 1918" (IAIN Salatiga, 2020), 91.

⁸ Abdul Malik, "Agitasi Dan Propaganda Di Media Sosial Studi Kasus Cyberwar Antar-Netizen Terkait Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama," *Jurnal Lontar* 4, no. 3 (2016), 2.

⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 69.

Pembahasan

Studi ini mengklasifikasikan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, mampu menghasilkan respon yang berbeda pula dalam menanggapi satu kasus yang sama. Pendekatan masyarakat yang telah memiliki akar kepercayaan kuat sebelum datangnya Islam, menghasilkan *treatmen* yang berbeda pula terhadap agama tersebut. Sementara itu, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi sikap masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat yang hidup di ruang lingkup keraton dengan kepercayaan kejawennya, memiliki sikap yang berbeda dengan masyarakat *Kauman* yang telah mendapatkan ajaran *transnasionalisme* dari timur tengah. Oleh karenanya, sebelum melihat ragam pendekatan dalam merespon artikel penodaan agama tersebut, perlu kita ketahui bagaimana karakteristik atau latar belakang kelompok-kelompok Muslim khususnya di Pulau Jawa.

Karakteristik Kelompok-Kelompok Islam

Secara umum, masyarakat Jawa dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan stratifikasi sosial yang dipengaruhi oleh unsur feodalisme yang telah meresap dalam budaya Jawa. R.M. Koentjaraningrat mempelajari pembagian masyarakat Jawa dari dua perspektif: horizontal (hubungan sosial antar manusia) dan vertikal (hubungan dengan Tuhan).¹⁰ Menurutnya, masyarakat Jawa membagi diri ke dalam empat tingkatan sosial: *ndara* (bangsawan), *priyayi* (birokrat), *wong dagang* (pedagang), dan *wong cilik* (rakyat kecil). Selain itu, ada klasifikasi berdasarkan tingkat ketaatan dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan, yang kemudian menghasilkan dua kelompok masyarakat Islam Jawa, yaitu Santri dan Abangan.¹¹

Terminologi "Santri" dan "Abangan" merupakan istilah khas Jawa yang dikenal luas di wilayah tersebut, meskipun tidak semua orang Jawa menggunakannya secara konsisten. Secara umum, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara individu Muslim Jawa yang menerapkan agama dengan tekun (Santri) dan yang cenderung kurang mematuhi ajaran agama (Abangan).¹² Namun, dalam masyarakat Jawa, tidak terjadi polarisasi atau sentimen negatif terhadap keduanya, sehingga istilah "santri-abangan" sering digunakan dengan santai di kalangan mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari, antara orang Santri dan Abangan memiliki hubungan yang saling menguntungkan, dengan pandangan positif satu sama lain. Orang Santri melihat Abangan bukan sebagai non-Muslim, tetapi sebagai individu Muslim yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan ajaran agama dengan sungguh-sungguh. Nurcholis Majid menganggap keduanya sebagai subkultur Islam di Jawa. Baginya, kesalehan tidak selalu terkait dengan penampilan ortodoks Santri, dan penggabungan unsur-unsur "non-Islam" dalam budaya keagamaan (Islam) oleh Abangan tidak mengurangi hakikat ke-Islaman. Sebagai alternatif moderat, istilah seperti "Agama Islam Jawa" atau "Kejawen" digunakan, menunjukkan upaya untuk menggabungkan tradisi Jawa dengan Islam melalui sastra Jawa. Pendapat lain mengusulkan "Islam Kejawen" sebagai alternatif untuk istilah "Abangan." Seorang Abangan juga mengakui bahwa Santri adalah contoh ideal dalam menjalankan agama. Hubungan Santri dan Abangan terlihat sangat dekat dalam beberapa praktik kehidupan sehari-hari.¹³ Utamanya dalam urusan yang berkaitan dengan agama, seperti tahlilan, pengurusan jenazah, seorang Abangan sering mencari bimbingan dan tunduk dalam kepemimpinan para santri.

Santri adalah sebutan umum bagi komunitas Muslim yang mengikuti pendidikan di pesantren. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan dari Timur Tengah dan India berkontribusi pada pertumbuhan dan penyebaran agama Islam di wilayah ini. Orang-orang mulai melakukan perjalanan Haji ke Makkah, membawa pulang pengalaman spiritual, dan mendirikan sekolah Quran di pedalaman Jawa.¹⁴ Pesantren-pesantren ini memiliki masjid sebagai pusat kegiatan dan ruang khusus untuk belajar agama, dan mereka yang tinggal di sana disebut sebagai santri. Seorang santri menyadari bahwa ia merupakan bagian dari minoritas yang hidup di tengah-tengah ketidaktahuan dan kepercayaan takhayul. Karena itu, mereka bertekad untuk belajar dan menyebarkan agama dengan benar. Awalnya, penyebaran Islam cenderung

¹⁰ Zaini Muchtarom, *Islam Di Jawa Dalam Perspektif Santri & Abangan*. (Jakarta: Salemba Diniyah). 7.

¹¹ *Ibid*, 11.

¹² Adib Fathoni, "Santri Dan Abangan Dalam Kehidupan Keagamaan Orang Jawa," *Jurnal At-Taqaddum* Vol 4, no. 1 (2012), 105.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Chicago: The university of Chicago Press, 1976), 291.

lambat karena memerlukan waktu untuk beradaptasi, dan pesantren memiliki pendekatan yang berbeda satu sama lain. Geertz mencatat bahwa banyak pesantren pada masa itu masih dipengaruhi oleh mistisisme. Hidup di tengah masyarakat Abangan dan kurangnya pemahaman agama membuat beberapa pesantren terlihat memiliki unsur-unsur kepercayaan yang cenderung mistik.

Jalinan kerjasama yang erat antara pedagang Arab dan penduduk setempat menciptakan pola baru di pesantren, menuju arah yang disebut modernisasi. Banyaknya penduduk yang melakukan ibadah Haji memudahkan aliran informasi melintasi benua. Perkembangan nasionalisme juga mulai muncul di pesantren, terinspirasi dari gerakan reformasi Islam di Mesir dan India.¹⁵ Pandangan baru tentang Islam muncul dari para alumnus Haji yang kembali ke tanah air. Mereka melihat Islam sebagai agama universal, bukan lagi sebagai sesuatu yang bersifat mistik. Beberapa dari mereka membentuk kelompok dengan tujuan mendakwahkan Islam sesuai keyakinan mereka, melawan penyimpangan. Menurut Geertz, fenomena ini tercermin dari pandangan penduduk pedalaman Jawa yang melihat Islam sebagai agama universal, unik, dan eksklusif.

Menurut Ricklefs,¹⁶ terdapat dua jenis Santri dalam masyarakat Jawa berdasarkan tempat tinggal mereka. Santri pedesaan biasanya tinggal di pesantren bersama para guru mereka (kiyai), sementara Santri perkotaan sering tinggal di daerah Kauman, yang dikenal sebagai tempat orang-orang saleh. Santri perkotaan memiliki lebih banyak interaksi dengan orang-orang dari luar, seperti Cina dan Timur Tengah, yang membuat mereka lebih terbuka terhadap gagasan pembaharuan dan kemajuan.

Kasus Penodaan Agama dalam Surat Kabar Djawi Hiswara

Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dunia jurnalistik mendapat perhatian yang cukup tinggi oleh masyarakat Indonesia. Peran jurnalisme mulai mengubah peran masyarakat dari sekadar pendengar menjadi pembaca berita. Surat kabar dan organisasi menjadi alat penting dalam melawan pemerintah kolonial.¹⁷ Sementara itu, surat kabar juga ambil bagian penting dalam berkembangnya dunia pergerakan. Berbagai macam ide, dan tujuan organisasi pergerakan kerap kali dimuat dalam surat kabar yang berafiliasi dengan organisasi tersebut. Komunikasi antar pengurus pusat dengan pengurus cabang suatu organisasi pergerakan juga sangat terbantu dengan adanya surat kabar.

Selain surat kabar yang dikelola oleh pergerakan, surat kabar juga ada yang dikelola oleh perseorangan atau swasta. Salah satu surat kabar swasta yang aktif pada masa kolonialisme Belanda adalah *Djawi Hiswara*. Surat kabar ini dikelola secara pribadi oleh Martodharsono, seorang pengurus SI Surakarta. Isinya mencerminkan ideologi Nasionalisme Jawa dikarenakan Martodharsono, sang redaktur *Djawi Hiswara* merupakan pengikut aliran kejawen.¹⁸ Dalam perkembangannya, tepatnya pada 9 dan 11 Januari 1918 muncul muatan dalam *Djawi Hiswara* yang menggemparkan masyarakat di Surakarta bahkan hingga kancah nasional, khususnya bagi mereka yang beragama Islam. Surat kabar berbasis ideologi kejawen itu, memuat sebuah tulisan yang berisi percakapan antara *Marto* dan *Djojo* yang isinya dianggap menghina Agama Islam, terutama Nabi Muhammad SAW, dengan mengatakan bahwa Nabi suka minum-minuman keras.¹⁹ Berikut adalah kutipan artikel tersebut yang ditulis menggunakan aksara dan bahasa Jawa.

“Marto: ‘Ah, seperti pegoeron (tempat beladjar ilmoe). Saja boekan goeroe, tjoemah bertjeritera atau memberi nasehat, kebetoelan sekarang ada waktoenja. Maka baiklah sekarang sadja. Adapon fatsal (selamatan) hoendjoek makanan itoe tidak perloe pakai nasi woedoek ajam tjengoek brendel. Sebab Goesti Kangdjeng Nabi Rasoel itoe minoem tjioe A.V.H. dan minum madat, kadang kadang kletet djoega soeka. Perloe apakah mentjari barang jang tidak ada. Meskipun ada banjak nasi woedoek, kalau tidak ada tjioe dan tjandoe tentoelah pajah sekali.”²⁰

¹⁵ *Ibid.*, 292.

¹⁶ M.C. Ricklefs, *Islamization and Its Opponents in Java*, ed. Dkk Terjemah. FX Dono Sunardi, Cetakan I (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2013), 205.

¹⁷ Wido Aditya, “Pengaruh Polemik Djawi Hiswara Terhadap Kondisi Sarekat Islam Tahun 1918-1920” (Universitas Sebelas Maret, 2011), 2.

¹⁸ Samsudjin Proboharjono, *Sejarah Pers Dan Wartawan Di Surakarta*, 1985, 45.

¹⁹ Djojodikoro, “Percakapan Marto & Djojo,” *Djawi Hiswara*, 1918.

²⁰ *Ibid.*

Sontak artikel tersebut mendapatkan berbagai macam kecaman dari kalangan umat Islam di Hindia Belanda. Walaupun demikian, adanya perbedaan latar belakang dan tujuan politik masyarakat Islam di Pulau Jawa, menjadikan cara merespon peristiwa penodaan agama tidak satu suara. Diantara mereka ada yang bersikap keras, sedikit lunak, atau bahkan ada yang berusaha untuk mendamaikan keduanya. Hal itu lah yang disebut sebagai ragam pendekatan masyarakat Islam dalam merespon isu penodaan agama.

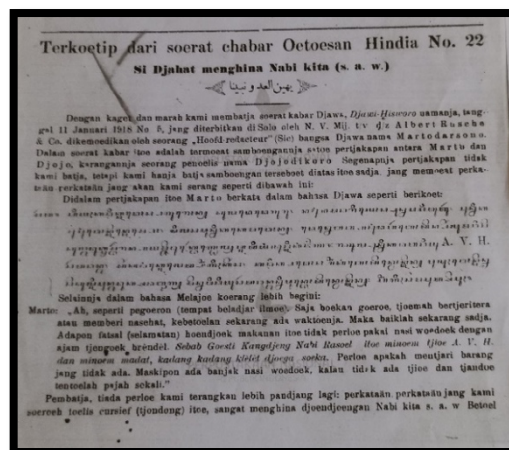
Bentuk-bentuk Respon Kelompok Islam

Sebelum kasus *Djawi Hiswara* tersebar luar, Martodharsono sang redaktur sejatinya telah melakukan klarifikasi bahwa ia tidak bermaksud menghina agama Islam. Kata-kata yang terkandung dalam artikel percakapan *Marto* dan *Djojo* yang terdapat dalam surat kabar *Djawi Hiswara* tersebut, memang harus dipahami oleh orang yang paham mengenai sastra Jawa, agar tidak salah memahaminya.²¹ Oleh karenanya, ia memaklumkan jika banyak orang yang tersinggung atas tulisan Djojosoediro tersebut.

Walaupun telah melakukan klarifikasi, Martodharsono tidak mampu menyembuhkan luka hati umat Islam yang tersinggung atas artikel tersebut. Pada awalnya, umat Islam di Hindia Belanda tidak terlalu menghiraukan tulisan tersebut. Bahkan, satu pekan setelah penerbitan artikel tersebut, tidak ada reaksi dari kalangan umat Islam. Salah satu faktornya adalah karena pembaca *Djawi Hiswara* yang tidak terlalu banyak, serta oplah surat kabar yang kecil.²² Respon kekecewaan terhadap artikel *Djawi Hiswara* mulai muncul pada bulan Februari 1918. Banyak umat Islam yang merasa tersinggung atas artikel tersebut dan menuntut Martodharsono untuk dihukum.

Aksi Lapangan

Tipe pertama dalam merespon isu penodaan agama *Djawi Hiswara* berbentuk respon reaktif yang dilakukan oleh anggota Sarekat Islam di Surabaya dan Surakarta. Meskipun artikel itu pertama kali muncul di Surakarta, tanggapan pertama kali muncul dari anggota SI di Surabaya. Awalnya, surat kabar *Oetosan Hindia* menerbitkan tulisan Abikoeso Tjokrosoejoso pada 31 Januari 1918 berjudul "Si Djahat Menghina Nabi Kita (s.a.w)". Isi tulisan tersebut menyatakan kekecewaan umat Islam atas artikel Djawi Hiswara dan menunjukkan mereka yang menghina keyakinan umat Islam sebagai "musuh bersama".²³ Artikel Abikoeso memainkan peran kunci dalam menjadikan isu *Djawi Hiswara* sebagai isu nasional. Hal tersebut terlihat dari banyaknya surat kabar daerah yang mengutip dan menyebarkan tulisan Abikoeso tersebut. Sebagai contoh, surat kabar *Islam Bergerak* di Solo turut menyebarkan rasa kekecewaan umat Islam. Respon reaktif juga datang dari SI Surakarta melalui Haji Misbach dan rekan-rekannya.



Gambar: Kutipan *Medan Moeslimin*²⁴

²¹ Ahmad Fajar, "Menuai Kuasa Atas Isu Agama: Politisasi HOS Cokroaminoto Terhadap Polemik Penistaan Agama Pada Surat Kabar Djawi Hisworo Di Hindia Belanda 1918." Hlm. 88.

²² Mu'arif, *Covering Muhammadiyah: Gerakan Islam Berkemajuan Dalam Sorotan Media Massa Pada Zaman Kolonial Belanda*. (Yogyakarta: IRCiSoD). Hlm 88.

²³ Abikoeso, "Si Djahat Yang Menghina Nabi Kita SAW," *Oetoesan Hindia*, 1918.

²⁴ Misbach, "Perasa'an," *Medan Moeslimin*, 1918.

Dalam surat kabar *Medan Moeslimin*, Haji Misbach mengekspresikan kekecewaannya sebagai seorang Muslim atas artikel *Djawi Hiswara*. Tulisan Haji Misbach berlanjut menjadi tiga episode dengan judul "*Perasa'an*", yang secara tegas menyoroti masalah *Djawi Hiswara*.²⁵ Misbach bahkan menyatakan, "*Siapa jang merampas agama islam, ituoelah jang wajib kita binasakan*."²⁶ Ini adalah contoh respon reaktif dari anggota SI Surakarta terhadap isu *Djawi Hiswara*.

Sementara itu, Pada malam tanggal 7 Februari 1918, umat Islam di Surabaya mengadakan perkumpulan di Gedung Perhimpunan Aldjami'ah, Surabaya, yang dipimpin oleh Tjokroaminoto dan dihadiri oleh perwakilan umat Islam dari berbagai golongan. Tujuan perkumpulan tersebut adalah untuk membahas kasus Martodharsono dan *Djawi Hiswara* yang telah menyakiti perasaan umat Islam.²⁷ Hasil dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa Martodharsono dan Djojosoediro bersalah karena menghina kepercayaan umat Islam, dan mereka meminta Sri Padoeka Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk memberikan hukuman kepada keduanya. Kemudian, pada malam tanggal 9 Februari 1918, sekitar dua ribu orang berkumpul di Surabaya dan membentuk "Tentara Kandjeng Nabi Muhammad".²⁸ TKNM dibentuk dengan harapan mampu menjadi benteng umat Islam dari mereka yang ingin menghina dan merendahkan.

Beberapa tulisan dari surat kabar *Islam Bergerak* dan *Oetoesan Hindia* memperlihatkan sikap reaktif dari anggota Sarekat Islam terhadap terbitnya artikel *Djawi Hiswara*. Sementara itu, ragam pendekatan lainnya dengan bentuk respon yang lebih modernis ditunjukkan oleh para anggota Muhammadiyah. Muhammadiyah memilih pendekatan hukum untuk menyelesaikan kasus penistaan agama tersebut. Mereka memutuskan untuk mengajukan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh artikel *Djawi Hiswara* ke pengadilan.²⁹ Melalui surat terbuka yang dimuat dalam surat kabar *Islam Bergerak* pada 1 April 1918, Ahmad Dahlan sebagai pemimpin pusat Muhammadiyah meminta pemerintah kolonial untuk menindaklanjuti kasus tersebut melalui proses hukum.

Respon Hukum

Pada 15 Maret 1918, K.H. Ahmad Dahlan juga mengirim pesan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johan Paul van Limburg Stirum, untuk segera menindak *Djawi Hiswara*. Pendekatan yang diambil oleh Ahmad Dahlan bukan berarti Muhammadiyah tidak peduli terhadap umat Islam yang dihina oleh orang lain. Namun, Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah sadar bahwa aksi lapangan hanya bersifat sementara, tidak produktif, dan tidak mampu menghasilkan dampak yang signifikan terhadap perbaikan umat Islam.³⁰ Dalam "*Soerat Terbuka*" yang ditulis Ahmad Dahlan melalui surat kabar *Islam Bergerak*, terdapat beberapa poin yang menjadi sikap Muhammadiyah atas kasus *Djawi Hisworo* tersebut.

Pada tanggal 21 Februari 1918, Muhammadiyah telah melakukan perkumpulan yang dihadiri oleh sekitar seribu umat Islam. Dalam perkumpulan tersebut, lahir beberapa poin mosi yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai berikut:

1. Surat Kabar *Djawi Hisworo* secara jelas telah menulis artikel yang isinya menghina Nabi Muhammad SAW.
2. Bahwa Hoofd Redacture yaitu Martodharsono ikut terlibat dalam kasus penghinaan tersebut dengan meloloskan dan memuat tulisan yang berisi "penghinaan" dalam surat kabar *Djawi Hisworo*.
3. Adanya peristiwa tersebut, membuat sakit hati umat Islam.
4. Mengingat tujuan Muhammadiyah yaitu sebagai organisasi keislaman, maka Muhammadiyah perlu menyatakan sikap atas peristiwa tersebut.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Misbach, "Sroean Kita," *Medan Moeslimin*, 1919.

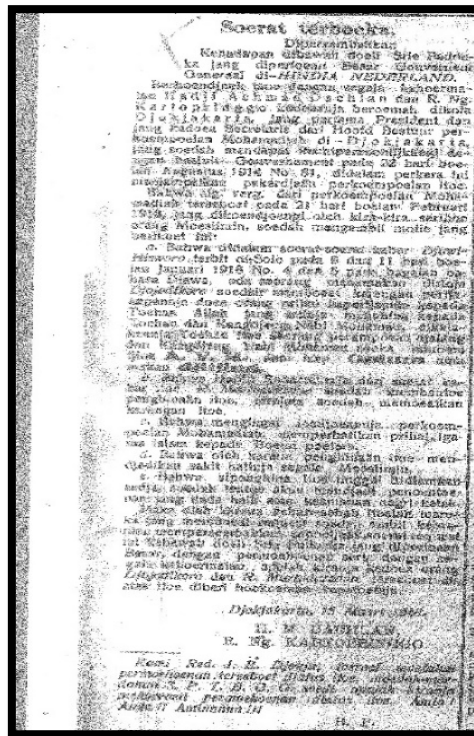
²⁷ Tjokroaminoto, "Comite Tentara Nabi Muhammad," *Oetoesan Hindia*, 1918.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Mu'arif, *Covering ...* Hlm. 97.

³⁰ Adam, "Surat Sakti KH. Ahmad Dahlan Dan Surat Kabar *Djawi Hisworo*," muhammadiyah.or.id, 2020. Dikutip pada 9 Maret 2023 pukul 22:42 WIB.

5. Ahmad Dachlan dan Kartopringgo meminta sang penulis artil dan Martodarsono dihukum sepatutnya. Karena jika si penghina itu didiamkan saja sudah tentu akan menjadi tontonan yang tidak baik atas keamanan negeri kelak.³¹



Gambar 2 : Kutipan Surat Ahmad Dahlan³²

Respon Damai

Pendekatan lain dalam merespon artikel kontroversial *Djawi Hiswara* juga ditunjukkan oleh golongan umat Islam lainnya. Mas Marco Kartodikromo, yang saat itu menjabat sebagai ketua Inlandsche Journalist Bond (IJB), berusaha untuk mendamaikan pertikaian antara Martodharsono dan perwakilan umat Islam.³³ Namun, upaya yang dilakukan oleh Marco tampaknya sia-sia karena masing-masing pihak tetap bertahan pada pendapat mereka. Selain itu, kurangnya popularitas Marco di kalangan umat Islam membuatnya kalah bersaing dengan Tjokroaminoto yang sudah bergerak menghimpun pasukan *Tentara Kandjeng Nabi Muhammad* (TKNM).³⁴ Gagalnya upaya yang dilakukan oleh Marco juga semakin terasa dengan memanasnya hubungan antara umat Islam dan kaum priyayi. Hal tersebut terlihat dengan lahirnya TKNM dari kalangan umat Islam dan Javaansch Nationalisme dari golongan priyayi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, TKNM muncul untuk membela umat Islam dari siapapun yang hendak mencemarkan. Begitu pula dengan JN, yang lahir sebagai upaya untuk memajukan dan melestarikan budaya Bangsa Jawa.³⁵

³¹ H.M. Dachlan dan H.M. Dachlan dan R.Ng. Kartopringgo, "Soerat Terboeka," *Islam Bergerak*, April 1918. *Islam Bergerak*, 1918.

³² *Islam Bergerak* 1 April 1918

³³ Mu'arif, *Covering...*, 97.

³⁴ Marco Kartodikromo mengawali karirnya dalam dunia jurnalistik saat menjadi koresponden dan asisten editor dalam surat kabar *Medan Prijaji* pada tahun 1910-1911. Pada tahun 1912, ia melanjutkan karir jurnalistiknya dengan menjadi koresponden surat kabar Darmo Kanda. Dari sini lah ia kemudian dekat dengan Samanhoedi dan Martodharsono yang notabene sama-sama murid dari Tirto Adisoewo dalam bidang jurnalistik. Dalam tulisan-tulisannya, Marco terkenal dengan gaya menulis yang radikal dan anti terhadap penjajah belanda. Lihat Ahmad Adam, 1984, 319.

³⁵ Redactie, "Comite Boeat Memadjoekan Cultur (Kepandaian Dan Hikajat Dari Bangsa Djawa)," *Darmo Kondo*, 1918.

Akhir Kasus Penodaan Agama

Dalam mengantisipasi perkembangan nasionalisme yang dibawa oleh mat Islam, pemerintah kolonial menciptakan penyeimbang untuk menghadapi perkembangan organisasi Islam nonpolitik. Salah satu bentuk penyeimbang tersebut adalah dengan mendukung aliran-aliran kebatinan atau ajaran yang bertentangan dengan agama Islam.³⁶ Pemerintah Belanda kemudian melakukan adu domba antara Islam dengan tradisi dan kepercayaan lokal pra-Islam. Sarekat Islam misalnya, yang secara tersirat menganut ideologi nasionalisme Islam, dianggap sebagai penghalang bagi kaum yang mendukung ideologi nasionalisme Jawa. Munculnya tulisan dari surat kabar *Djawi Hiswara* pada bulan Januari 1918 mencapai puncak ketegangan antara masyarakat yang mengikuti aliran kejawen dengan umat Islam.

Tuntutan untuk menghukum *Djawi Hiswara* juga ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda. Hal tersebut tergambar dari berbagai mosi yang disampaikan melalui surat kabar (*Islam Bergerak, Oetoesan Hindia, Medan Moeslimin*), yang meminta agar pemerintah Hindia Belanda mengambil sikap tegas terhadap perbuatan Martodharsono tersebut. Namun, sikap pemerintah kolonial terhadap peristiwa tersebut adalah memilih untuk diam. Keputusan ini didasarkan pada pandangan bahwa status hukum *Djawi Hiswara* seharusnya berada di bawah pemerintahan Kraton Kasunanan Solo.³⁷ Sementara itu, semakin memanasnya hubungan antara umat Islam dan Kristen dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial melalui kasus tersebut. Islam yang mulai dianggap beralih ke arah politik, menjadi sasaran tekanan oleh pemerintah kolonial untuk kembali fokus mengurus agama mereka sendiri yang tengah mengalami konflik internal. Oleh karena itu, pemerintah kolonial seolah-olah menyerahkan kasus ini kepada pihak Kerajaan Islam, yaitu Kasunanan Surakarta.

Menurut undang-undang pemerintah kolonial yang berlaku, raja Kasunanan memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman atas peristiwa tersebut. Dekatnya hubungan antara Martodharsono dengan kraton membuat pelaksanaan hukuman atas kasus tersebut terasa sulit dilakukan. Martodharsono adalah abdi dalem dari Kraton Kasunanan, yang membuat proses hukum terhadapnya menjadi rumit.³⁸ Raja-raja Jawa pada masa itu memang memimpin kerajaan Islam, tetapi sebagian besar dari mereka masih memegang teguh kepercayaan pada leluhur dan tradisi Kejawen. Kedekatan antara raja dan para abdi dalem dengan kepercayaan Kejawen sedikit memengaruhi sikap mereka dalam menanggapi kasus Djawi Hiswara.

Setelah berbagai upaya dilakukan, nyatanya kasus ini tidak pernah sampai ke pengadilan. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini tidak sampai ke tahap jatuhnya hukuman. Dalam surat kabar *Oetoesan Belanda*, disebutkan beberapa faktor ditolakannya pengajuan-pengajuan umat Islam kepada pengadilan Hindia Belanda.³⁹ Ada tiga hal penting yang diungkapkan dalam artikel berjudul "*Perkara Djawi Hiswara*" yang berlandaskan aturan perundang-undangan atau yang dikenal dengan *Regering reglement* (R.R).⁴⁰

Pasal 47 dalam *regeringreglement* sejatinya dapat digunakan untuk menuntut Martodharsono. Dalam catatan bahasa Belanda, berbunyi "*mag uitzetting of verbanning alleen plaats hebben als de persoon gevaarlijk is voorde openbare orde en rust*".⁴¹ Bahwa orang yang mengganggu ketertiban umum dapat dihukum dengan pengasingan. Artikel terbitan Martodharsono yang telah menyebabkan kegemparan di kalangan umat Muslim di Hindia Belanda bisa dianggap melanggar pasal ini. Namun, setelah Martodharsono memberikan klarifikasi dan meminta maaf melalui tulisan pada 4 Februari 1918 di *Djawi Hiswara*, pasal ini tidak lagi berlaku bagi Martodharsono.⁴² Sementara itu, undang-undang yang berlaku juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan perkumpulan yang menyampaikan aspirasi dan kekecewaannya terhadap surat kabar

³⁶ Ahmad Mansur S, *Api Sejarah Jilid 1* (Bandung: Surya Dinasti, 2015), 110-111.

³⁷ Wido Aditya, "Pengaruh Polemik Djawi Hiswara Terhadap Kondisi Sarekat Islam Tahun 1918-1920," 86.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ A.M., "Perkara Djawi Hiswara," *Oetoesan Hindia*, April 1918.

⁴⁰ Regering Reglement (R.R) adalah singkatan dari undang-undang yang lengkapnya berbunyi Reglement op Het Beleid der Regering van Nederlands Indie, merupakan peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan di Hindia Belanda. (<https://elearning.unisba.ac.id/>, 2020).

⁴¹ F.C. Hekmeijer, *Het Regeringsreglement van Nederlandsch-Indie* (Batavia-Weltevreden-Leiden: G. Kolff & Co, 1924).

⁴² A.M., "Perkara Djawi Hiswara."

Djawi Hiswara. Pasal ini juga sebagai pembelaan atas dasar berdirinya Tentara Kandjeng Nabi Muhammad (TKNM). Tindakan ini tidak melanggar hukum, karena mereka hanya menyampaikan aspirasi mereka. *Regeringsreglement* juga menyatakan bahwa hukuman akan diberikan kepada siapa pun yang menyebabkan kebencian, perselisihan, atau perkelahian antar bangsa di Hindia Belanda. Menurut ahli hukum yang dikutip dalam surat kabar *Oetoesan Hindia*, kasus *Djawi Hiswara* tidak dapat diajukan ke pengadilan karena kasus ini berkaitan dengan agama, bukan perselisihan antar bangsa. Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum untuk mengadili kasus ini di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya alasan Martodharsono bisa lepas dari proses hukum sudah cukup jelas. Meskipun begitu, kegemparan seputar Djawi Hiswara ternyata membekas dalam kehidupan sosial masyarakat Hindia Belanda. Penyelesaian konflik terlihat ketika surat kabar tersebut berhenti beredar pada akhir tahun 1919.⁴³

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa keragaman pendekatan masyarakat terhadap kasus tersebut mencerminkan kompleksitas karakteristik dan latar belakang sosial serta politik mereka. Masyarakat Jawa, terbagi dalam berbagai kelompok sosial, juga memiliki perbedaan dalam tingkat ketaatan terhadap ajaran agama, yang menghasilkan dua kelompok utama: Santri dan Abangan. Bahwa dalam menanggapi isu penodaan agama yang dilakukan dalam artikel *Djawi Hiswara*, menghasilkan tiga respon umat Islam, Diantaranya adalah respon reaktif lapangan, reaktif hukum, hingga pendekatan damai. Kelompok seperti Sarekat Islam bereaksi secara keras, dengan mengorganisir protes publik dan bahkan membentuk Tentara Kandjeng Nabi Muhammad. Sementara itu, Muhammadiyah mengambil pendekatan hukum dengan mengajukan kasus ke pengadilan. Ada juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh tokoh seperti Mas Marco Kartodikromo. Meskipun kasus ini tidak sampai ke pengadilan karena berbagai alasan hukum dan politik, dampaknya tetap terasa dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada akhirnya, polemik seputar *Djawi Hiswara* meredup dan fokus umat Islam mulai bergeser pada isu-isu lain yang bersifat internal pada tahun 1922.

Daftar Acuan

- A.M. "Perkara Djawi Hiswara." *Oetoesan Hindia*, April 1918.
- Abdul Malik. "Agitasi Dan Propaganda Di Media Sosial Studi Kasus Cyberwar Antar-Netizen Terkait Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama." *Lontar* 4, no. 3 (2016), 1–15.
- Abikoeno. "Si Djahat Yang Menghina Nabi Kita SAW." *Oetoesan Hindia*. 1918.
- Adam. "Surat Sakti KH. Ahmad Dahlan Dan Surat Kabar Djawi Hisworo." muhammadiyah.or.id, 2020.
- Adib Fathoni. "Santri Dan Abangan Dalam Kehidupan Keagamaan Orang Jawa." *At-Taqaddum* 4, no. 1 (2012), 101–121.
- Ahmad Fajar. "Menuai Kuasa Atas Isu Agama: Politisasi HOS Cokroaminoto Terhadap Polemik Penistaan Agama Pada Surat Kabar Djawi Hisworo Di Hindia Belanda 1918." IAIN Salatiga, 2020.
- Ahmad Mansur S. *Api Sejarah Jilid 1*. Bandung: Surya Dinasti, 2015.
- Ahmad Nasrudin. "Panji Gumilang Tersangka Penistaan Agama, Berikut Kasusnya." Kompas.com, 2023.
- Clifford Geertz. *The Religion of Java*. Chicago: The university of Chicago Press, 1976.
- Djojodikoro. "Percjakapan Marto & Djojo." *Djawi Hiswara*, 1918.
- Fajar, Ahmad. "Menuai Kuasa Atas Isu Agama: Politisasi Hos Cokroaminoto Terhadap Polemik Penistaan Agama Pada Surat Kabar Djawi Hisworo Di Hindia Belanda,(1918)." Salatiga: IAIN Salatiga, 2021.
- Gloria, Rahmad Utomo dan. "Tiktoker Morteza Melakukan Penistaan Agama, Mengaku Hanya Becanda." Kompas.com, 2023.
- H.M. Dachlan, and R.Ng. Kartopringgo. "Soerat Terboeka." *Islam Bergerak*, April 1918.
- Hekmeijer, F.C. *Het Regeringsreglement van Nederlandsch-Indie*. Batavia-Weltevreden-Leiden: G. Kolff & Co, 1924.
- Kartopringgo, H.M. Dachlan dan R.Ng. "Soerat Terboeka." *Islam Bergerak*, April 1918.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

⁴³ Soebagijo, *Sejarah Pers Indonesia* (Jakarta: Dewan Pers, 1977). Hlm. 27.

- M.C. Ricklefs. *Islamization and Its Opponents in Java*. Edited by Dkk Terjemah. FX Dono Sunardi. Cetakan I. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013.
- Misbach. "Perasa'an." *Medan Moeslimin*, 1918.
- . "Sroean Kita." *Medan Moeslimin*, 1919.
- Mu'arif. *Covering Muhammadiyah: Gerakan Islam Berkemajuan Dalam Sorotan Media Massa Pada Zaman Kolonial Belanda*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Proboharjono, Samsudjin. *Sejarah Pers Dan Wartawan Di Surakarta*, 1985.
- Redactie. "Comite Boeat Memadjoekan Culturr (Kepandaian Dan Hikajat Dari Bangsa Djawa." *Darmo Kondo*, 1918.
- Soebagijo. *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers, 1977.
- Tjokroaminoto. "Comite Tentara Nabi Muhammad." *Oetoesan Hindia*, n.d.
- Wido Aditya. "Pengaruh Polemik Djawi Hiswara Terhadap Kondisi Sarekat Islam Tahun 1918-1920." Universitas Sebelas Maret, 2011.
- Zaini Muchtarom. *Islam Di Jawa Dalam Perspektif Santri & Abangan*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.